

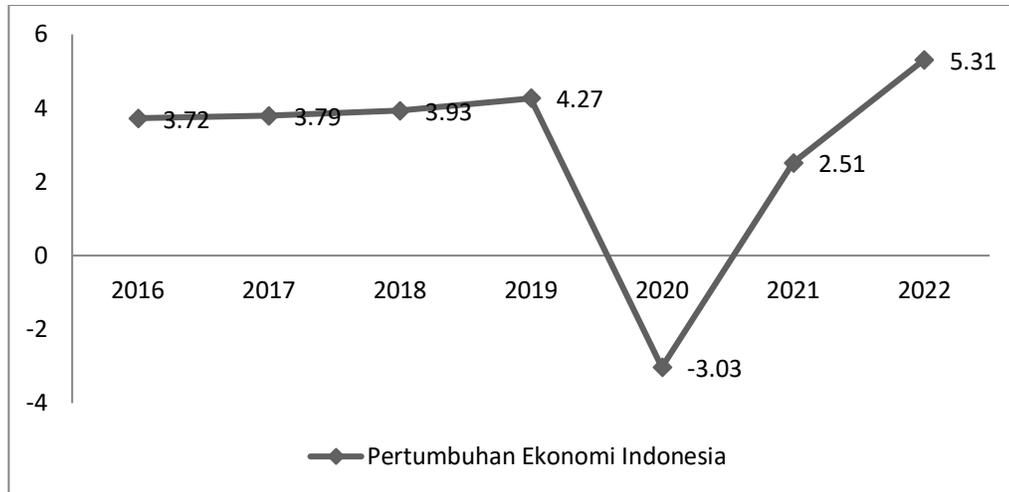
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dengan menerapkan program pembangunan ekonomi, pemerintah Indonesia saat ini berusaha mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Salah satu cara sebuah negara dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya adalah pembangunan ekonomi. Menurut Hidayat et al. (2011), pertumbuhan ekonomi sudah menjadi masalah makroekonomi, dan peningkatan output adalah hasilnya. Dengan harapan pertumbuhan ekonomi yang sehat dapat membantu pembangunan dengan sifat *suistenable* atau berkelanjutan sehingga baik dalam jangka pendek maupun panjang akan memberikan dampak bagi kesejahteraan rakyat. Penting untuk memahami bahwa pertumbuhan ekonomi bagian dari instrumen penting dalam sistem ekonomi.

Tingkat pertumbuhan ekonomi adalah ukuran keberhasilan pembangunan sebuah negara (Amdan & Sanjani, 2023). Dengan demikian, masing-masing wilayah akan menempuh jalan paling efektif dan efisien dalam merealisasikan pertumbuhan ekonomi yang paling cepat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya. Produk Domestik Bruto (PDB), yang terdiri dari berbagai sektor ekonomi, dan memiliki sektor unggulan yang berbeda-beda di setiap negara, digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi setiap tahun. Aktivitas peningkatan *output* dalam suatu sistem ekonomi disebut sebagai pertumbuhan ekonomi. Peningkatan pertumbuhan ekonomi menunjukkan bahwa salah satu indikator pembangunan ekonomi mengalami peningkatan dan berdampak positif pada pembangunan ekonomi secara keseluruhan. Laju pertumbuhan ekonomi Indonesia dari tahun 2016 hingga 2022 disajikan di bawah ini:



Grafik 1. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

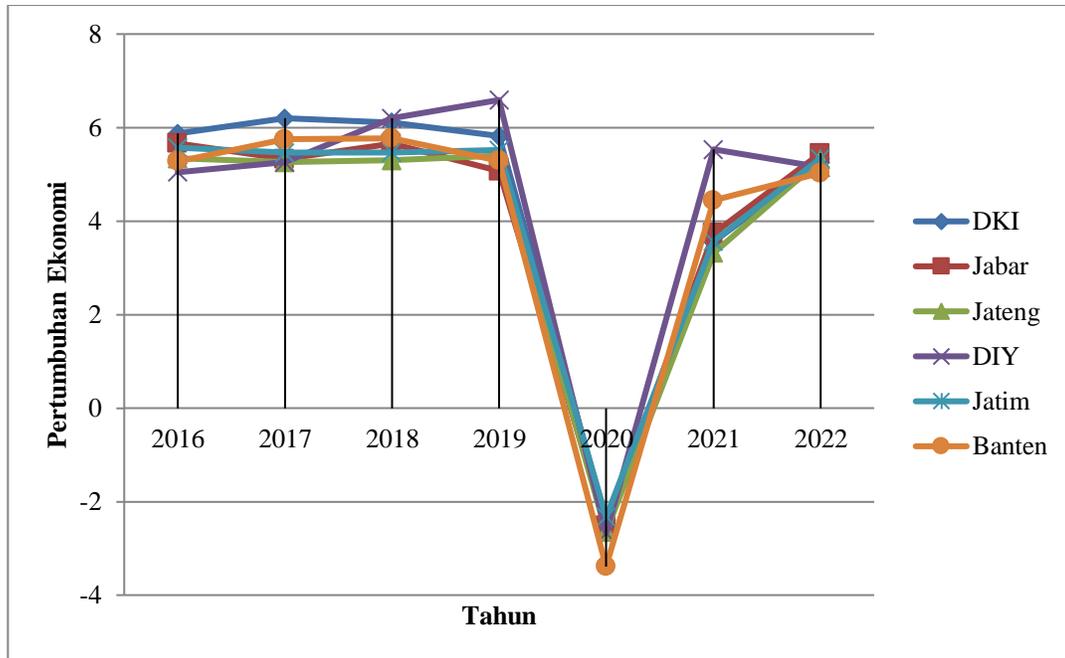
Sumber : BPS RI, 2022.

Grafik 1 diatas dapat menarik kesimpulan bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia selama 7 tahun terakhir cukup fluktuasi dan terdapat pertumbuhan minus. Dari data tersebut dapat dihimpun bahwa rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional adalah 2.92% selama rentang 2016-2022. Jika diperbandingkan dengan Pulau Jawa yang merupakan pusat ekonomi Inonesia, ternyata Pulau Jawa memiliki rata-rata jauh lebih tinggi pada observasi yang sama yakni 4.14%. Adapun pulau-pulau lain, seperti Sumatera mencatatkan pertumbuhan ekonomi 2.2%, Kalimantan 3.1%, Bali-Nusa Tenggara 1.12%, Sulawesi 3.2%, dan Maluku-Papua 3.5%. Maka berdasarkan data tersebut, tiga pulau yang melebihi rata-rata nasional pada observasi yang sama adalah Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku-Papua (BPS,2023).

Pada rentang tahun 2016-2019 pencapaian pertumbuhan ekonomi cenderung meningkat meski tidak signifikan. Akibat adanya pandemi COVID-19 pada tahun 2020, dimana hampir semua sektoral terkena dampak kebijakan pencegahan penyebaran COVID. Saat itu banyak perusahaan melakukan *lay-off* kepada karyawan karena untuk mengurangi beban

operasional yang tidak sebanding dengan penjualan. Kemudian, dari sisi konsumen juga kehilangan daya beli karena turunya pendapatan. Selanjutnya dari sisi fiskal juga turunya perolehan dana investasi sehingga ini menghambat pertumbuhan ekonomi. Puncaknya, pertumbuhan ekonomi mencapai titik minus (-3.03%) pada tahun 2020 dan baru memulai *recovery*-nya pada tahun 2021.

Pandemi sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi pada tahun tersebut, menyebabkan perlambatan signifikan. Di tengah pandemi, pemerintah memberlakukan kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), yang mengakibatkan terhentinya sejumlah sektor ekonomi, kecuali sektor kesehatan. Krisis ekonomi yang diinduksi oleh COVID-19 menyebabkan penurunan kegiatan produksi, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), peningkatan tingkat pengangguran, dan penurunan mobilitas dalam dunia usaha, bahkan beberapa usaha mengalami kegagalan. Adapun pulau Jawa merupakan salah pulau yang juga sangat terdampak perekonomiannya akibat dari COVID-19. Berikut adalah progres pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa dari tahun 2016 hingga 2022 :



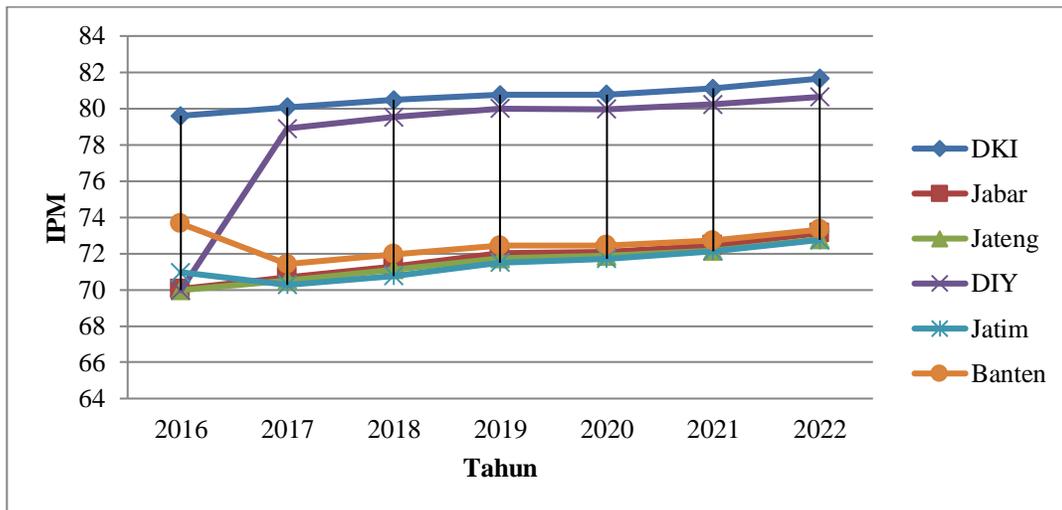
Grafik 2 . Pertumbuhan Ekonomi Pulau Jawa

Merujuk pada grafik 2 maka akan didapatkan pola yang sama, yakni seluruh Provinsi di Pulau Jawa selama masa observasi mengalami pertumbuhan negatif pada tahun 2020. Seluruh Provinsi juga konsisten melakukan *recovery* setidaknya dimulai pada kuartal II tahun 2021. Kemudian pada tahun 2022 juga terlihat pola peningkatan signifikan di semua Provinsi dan kembali ke *steady growth* seperti pada tahun 2019 atau sebelum COVID-19 terjadi. Artinya adalah, seluruh Provinsi di Pulau Jawa Tengah sama-sama tidak siap dalam melakukan upaya mitigasi COVID-19 dan berdampak pada seluruh sektoral.

Kemudian dalam konteks grafik 2, Banten dianggap sebagai tempat permukiman dan perekonomian yang potensial. Banten memiliki banyak industri dari perspektif ekonomi. Provinsi Banten memiliki posisi yang strategis karena menjadi jalur utama untuk perdagangan antara Jawa dan Sumatera serta untuk perputaran perdagangan di Asia dan di luar negeri. Jadi, saat pandemi melemahkan beberapa sektor ekonomi, provinsi ini paling terkena dampak. Pada tahun 2020, ekonomi Provinsi Banten mengalami pertumbuhan

negatif sebesar 3,39%. Namun, pada tahun 2022, ekonomi Jawa Barat tumbuh sebesar 5,45%, yang merupakan pertumbuhan tertinggi di seluruh Pulau Jawa, mengalahkan DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, dan DI Yogyakarta.

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah salah satu faktor yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi sebuah wilayah. Jumlah SDM yang tinggi memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan modal manusia untuk mencapai pembangunan ekonomi yang lebih baik. IPM diukur dengan pengeluaran riil perkapita dan diukur dengan tingkat umur panjang, kesehatan, jenjang pendidikan, dan standar hidup yang terpenuhi. Semakin tinggi angka IPM di suatu wilayah, semakin baik kualitas sumber daya manusianya. Data indeks pembangunan manusia Pulau Jawa berikut:



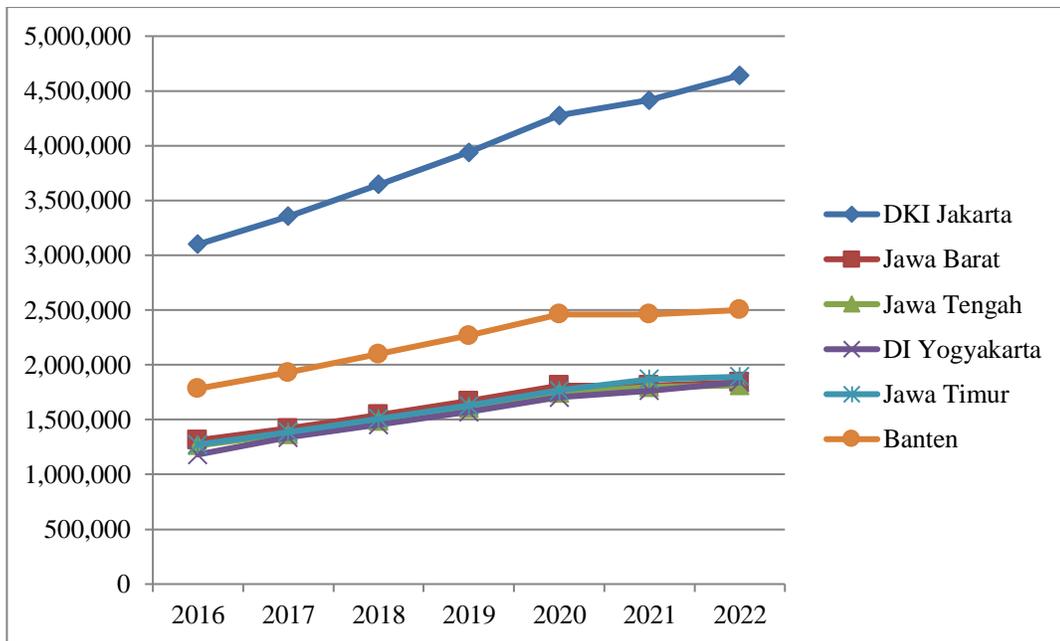
Grafik 3. Indeks Pembangunan Manusia di Pulau Jawa

Sumber : BPS, 2022.

Grafik 3 diatas menyimpulkan bahwa IPM antar Provinsi di Pulau Jawa cenderung masih timpang. Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi DKI dan DIY cukup signifikan diatas Provinsi lainnya yakni direntang 78-82 indeks. Adapun Provinsi lainnya masih berada disekitar

69-74 indeks. Maka kesimpulan besar dari hasil data tersebut adalah pembangunan manusia di Provinsi Pulau Jawa masih belum merata dan hanya terpusat pada kota-kota besar saja. Yogyakarta hampir setara DKI dikarenakan statusnya sebagai Kota Pelajar dan menjadi basis pendidikan nasional.

Pertumbuhan ekonomi yang kuat dan berkelanjutan sangat penting untuk kelangsungan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. Penambahan pendapatan diperlukan karena jumlah penduduk yang tumbuh setiap tahun mengakibatkan peningkatan kebutuhan konsumsi sehari-hari. Upah minimum, yang merupakan bagian dari pendapatan pekerja, diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi, karena merupakan komponen penting dari pendapatan perkapita dan pertumbuhan ekonomi sebuah daerah. Upah minimum juga berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi, yaitu dalam pencapaian kesejahteraan dan kemakmuran tenaga kerja.



Grafik 4, UMR Provinsi Di Pulau Jawa

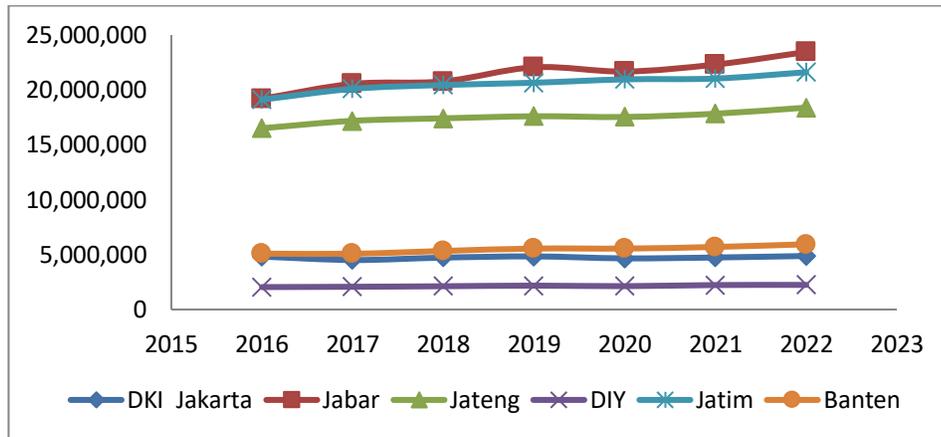
Sumber : BPS, 2022.

Meski DIY memiliki IPM yang cenderung tinggi daripada Provinsi lain, sebagaimana tersaji dalam grafik 3, namun ternyata hal tersebut tidak membawa mereka ke dalam upah yang tinggi. Pada grafik 4 DIY menempati posisi terakhir dalam tingkat UMR se-Pulau Jawa. Adapun DKI sangat jauh diatas Provinsi lainnya bahkan hampir menyentuh angka 5 juta setiap bulanya. Hal itu wajar karena standar hidup di DKI sangat tinggi mengingat posisinya sebagai pusat aktivitas perekonomian di Indonesia. Namun hal itu juga merepresentasikan bahwa aktivitas ekonomi sebaiknya merata di setiap Provinsi tidak hanya di Ibukota saja. Sehingga tingkat upah juga tidak timpang seperti pada grafik 4. Meski setiap tahunnya meningkat, namun peningkatan tersebut sebenarnya hasil dari penyesuaian inflasi yang setiap periodenya juga cenderung meningkat.

Salah satu faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah kualitas sumber daya manusia sebuah negara. Jumlah penduduk yang terus meningkat dapat mendorong atau menghambat pertumbuhan ekonomi. Jumlah penduduk yang lebih besar akan menghasilkan lebih banyak tenaga kerja, dan penambahan ini memungkinkan sebuah daerah untuk menghasilkan lebih banyak produk. Penumbuhan ekonomi tidak akan sejalan dengan peningkatan kesejahteraan jika penambahan penduduk tidak diimbangi dengan peningkatan kesempatan kerja.

Salah satu faktor yang memengaruhi output suatu negara adalah tenaga kerja, populasi yang besar akan memiliki angkatan kerja yang besar. Dalam model Cob-Douglas, dapat diketahui bahwa jumlah tenaga kerja yang besar akan berpengaruh terhadap tingkat produksi. Namun, menurut Todaro (2000), pertumbuhan penduduk tampaknya akan berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi. Hal ini jika pertumbuhan penduduk tidak diikuti oleh akapasitas pembangunann manusia, sehingga yang muncul adalah adanya

sumber daya manusia yang inkompeten yang hanya akan membebani keuangan negara. Jumlah tenaga kerja yang berkualitas menentukan *output* sehingga tidak hanya kuantitasnya namun juga kualitasnya. Sebagai contoh, jumlah tenaga kerja per provinsi Pulau Jawa adalah sebagai berikut:



Grafik 5. Tenaga Kerja di Pulau Jawa

Sumber : BPS, 2022.

Merujuk pada tabel 5 diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah tenaga kerja antar Provinsi di Pulau Jawa masih timpang dan tidak merata. Provinsi Jawa Barat memiliki proporsi tenaga kerja yang jauh lebih tinggi daripada DIY, Banten dan DKI. Hal tersebut menyebabkan pemerataan ekonomi menjadi berkurang. Pusat-pusat industri hanya dibangun di wilayah Jawa Barat seperti Karawang dan Cikarang sehingga pola ketenagakerjaan tersebut tidak memberikan dampak perekonomian yang signifikan bagi masyarakat maupun negara.

Beberapa indikator perekonomian dapat digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi suatu negara atau daerah, salah satunya adalah tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran menunjukkan apakah ekonomi negara atau daerah tersebut berkembang, melambat, atau bahkan mengalami kemunduran. Pengangguran merupakan bagian dari

masalah ketenagakerjaan yang dialami setiap daerah, khususnya di Pulau Jawa. Pengangguran memang menjadi suatu permasalahan yang perlu ditangani untuk perekonomian (Rakasiwi, 2019). Tingkat pertumbuhan penduduk semakin meningkat di setiap tahun akan menyebabkan meningkatnya angkatan kerja. Persoalan tingkat pengangguran meningkat akan membawa dampak perekonomian yang negatif. Berikut data tingkat pengangguran terbuka di Pulau Jawa pada tahun 2016-2022 :

Tabel 1. Tingkat Pengangguran Terbuka di Pulau Jawa

Provinsi	Tahun						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
DKI	6.12	7.14	8.04	7.50	10.34	8.50	7.18
Jabar	8.89	8.22	6.65	6.54	10.95	9.82	8.31
Jateng	6.61	4.57	8.23	8.04	10.46	5.95	5.57
DIY	2.72	3.02	4.47	4.44	6.48	4.56	4.06
Jatim	4.21	4.00	3.37	3.82	5.84	5.74	5.49
Banten	8.92	9.28	3.97	8.11	10.64	8.98	8.09

Sumber : Data diolah, 2023.

Berdasarkan tabel 1 diatas dapat dijelaskan bahwa tingkat pengangguran pada setiap provinsi Pulau Jawa dari tahun 2016-2022 berfluktuatif. Angka tertinggi berada di tahun 2020 yaitu Provinsi Jawa Barat yang mencapai 10.95 persen. Kemudian disusul oleh Provinsi Banten mencapai 10.64 persen, Provinsi Jawa Tengah sebesar 10,46 persen, dan Provinsi Jakarta sebesar 10,34 persen. Dari keempat provinsi tersebut, angka tingkat pengangguran tertinggi sebesar masing-masing 10 persen. Tahun 2020 merupakan adanya bencana global pandemi COVID-19. Kondisi tersebut membuat masyarakat merasakan imbas dari bencana kesehatan tersebut. Dari penyebab tersebut banyak yang terkena dampaknya di berbagai sektor perekonomian, sehingga banyak jumlah tenaga kerja yang di Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Maka makin bertambah pula jumlah pengangguran pada pulau Jawa.

Pulau Jawa adalah salah satu pulau di Indonesia yang terdiri dari enam Provinsi: DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Banten. Ada 160 juta orang tinggal di pulau ini, dan lebih dari 60% dari populasi Indonesia tinggal di sana. Pulau Jawa adalah salah satu pulau dengan populasi tertinggi dengan kepadatan 1.317 jiwa/km². Pertumbuhan industri di banyak kota di Pulau Jawa menyebabkan pertumbuhan ekonomi.

Studi sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh (Prayitno & Yustie, 2020), tentang "Pengaruh Tenaga Kerja, IPM, dan Kemiskinan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Timur tahun 2014–2018", menemukan bahwa variabel IPM dan kemiskinan berpengaruh secara parsial terhadap pertumbuhan ekonomi di beberapa kabupaten/kota di Jawa Timur dari tahun 2014 hingga 2018. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Norlita (2018) tentang "Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja, dan Infrastruktur terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Pulau Jawa tahun 2006-2015" menemukan bahwa faktor-faktor yang disebutkan di atas memiliki dampak positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Pulau Jawa?
2. Bagaimana pengaruh Upah Minimum Provinsi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Pulau Jawa?
3. Bagaimana pengaruh Tenaga Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Pulau Jawa?
4. Bagaimana pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Pulau Jawa?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Pulau Jawa.
2. Untuk mengetahui pengaruh Upah Minimum Provinsi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Pulau Jawa.
3. Untuk mengetahui pengaruh Tenaga Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Pulau Jawa.
4. Untuk mengetahui pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Pulau Jawa.

D. Batasan Penelitian

Pengaruh pertumbuhan ekonomi Pulau Jawa adalah fokus penelitian ini. Untuk mengambil kebijakan tersebut, pemerintah harus campur tangan dalam mengendalikan pertumbuhan ekonomi. Jika tidak terkendali, akan berdampak pada lingkungan sosial.

E. Manfaat Penelitian

a. Bagi Peneliti

Diharapkan bahwa penelitian ini akan berfungsi sebagai referensi bagi para peneliti yang akan bekerja pada topik yang sama pada masa mendatang.

b. Bagi Pemerintah

Ini bertujuan untuk menyampaikan informasi secara bersamaan sebagai bahan pertimbangan kebijakan untuk membantu mengontrol pertumbuhan ekonomi Provinsi Pulau Jawa.

c. Bagi Masyarakat

Harapan dari penelitian ini adalah untuk memberikan masyarakat pemahaman yang lebih baik tentang keadaan aktual tentang komponen yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Pulau Jawa.

F. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini melihat bagaimana Indeks Pembangunan Manusia, Upah minimum Provinsi, Tenaga Kerja, dan Tingkat Pengangguran Terbuka memengaruhi pertumbuhan ekonomi Pulau Jawa dari tahun 2016 hingga 2022